

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara *middle power* yang cukup aktif berpartisipasi dalam hubungan internasional dan menggunakan forum multilateral untuk mencapai tujuan politik luar negeri. Keanggotaan Indonesia di DK PBB pada periode 2019—2020 yang bertepatan dengan peringatan dua puluh tahun agenda *women, peace, and security* (WPS) dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menjalankan salah satu isu prioritas politik luar negerinya mengenai perempuan dan perdamaian. Indonesia mengadvokasikan dan memprakarsai sebuah resolusi DK PBB mengenai partisipasi perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian. Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji diplomasi *middle power* Indonesia di DK PBB dan mengidentifikasi motif atau faktor yang melatarbelakangi keputusan tersebut dalam polugri Indonesia dengan menggunakan konsep *middlepowermanship* dan *role theory*. Skripsi ini berargumen bahwa Indonesia melakukan diplomasi *middle power* dalam mempromosikan agenda WPS di DK PBB pada 2019—2020, dan keputusan Indonesia untuk mempromosikan agenda WPS dipengaruhi oleh ego dan *alter expectations* yang membentuk konsepsi peran sebagai mitra perdamaian, *bridge-builder*, dan *norm entrepreneur* dalam politik luar negeri Indonesia.

Kata-kata kunci: Indonesia; diplomasi *middle power*; agenda *women, peace and security*; Dewan Keamanan PBB; peran

ABSTRACT

Indonesia is a middle-power country that actively engages in international relations through multilateral forums to achieve its foreign policy goals. Indonesia's participation in the UN Security Council in the 2019-2020 term, which coincides with the twentieth anniversary of the women, peace and security (WPS) agenda was utilized by Indonesia to carry out one of its foreign policy priorities regarding women and peace. Indonesia campaigned for and initiated a United Nations Security Council resolution on women's participation in peacekeeping. Using the concepts of middle power management and role theory, this thesis intends to investigate Indonesia's middle power diplomacy in the UN Security Council and identify the motives or factors behind this decision in Indonesian foreign policy. This thesis argues that Indonesia conducted middle power diplomacy by promoting the WPS agenda at the UN Security Council in 2019-2020, and that Indonesia's decision to promote the WPS agenda is influenced by ego and alter expectations which shape Indonesian foreign policy's role conceptions as a peace partner, bridge-builder, and norm entrepreneur.

Keywords: Indonesia; middle power diplomacy; women, peace and security agenda; United Nations Security Council; role